

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

JUDUL	II
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	V
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	VI
MOTTO	VII
PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	XI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	XIII
DAFTAR ISI	XXI
ABSTRAK	XXII
ABSTRACT	XXIV
الخلاصة	XXVI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Peneliti.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penegasan Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Konflik Sosial	14
B. Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	21
C. Organisasi	25
D. Perbedaan Kepentingan	26
E. Kekuasaan Yang Tidak Seimbang.....	28
F. Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah	29
G. Fiqh Siyasah	37
H. Penelitian Terdahulu.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Rancangan Penelitian	54
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Lokasi Peneliti	56
D. Data dan Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Dokumentasi.....	61
G. Teknik Analisis Data	61
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	64
I. Tahap Penelitian	66
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	68
A. Objek Lokasi Penelitian.....	68
B. Paparan Data.....	71
C. Temuan Penelitian.....	79
D. Analisis Data Penelitian Berdasarkan Iceberg Analysis.....	80
BAB V PEMBAHASAN	83
A. Kesesuaian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dengan Realitas Penanganan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Watulimo	83
B. Tantangan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Akar Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Watulimo	87
C. Perspektif Fiqh Siyasah sebagai Alternatif Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sosial	91
D. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan	96
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104
BIODATA PENULIS	134